

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian Pengaruh Penerimaan Retribusi Obyek Wisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pembangunan Kabupaten Kaimana, dapat diperoleh kesimpulan mengenai deskripsi hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

1. Deskripsi hasil penelitian yang digunakan meliputi intensitas wisatawan, penerimaan retribusi obyek wisata dan anggaran pembangunan Kabupaten Kaimana.
 - a. Intensitas wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kaimana pada tahun 2011 dan 2012 berjumlah 105 orang yang diperoleh dari data kunjungan wisatawan pada Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya berasal dari beberapa Negara yang didomisili oleh wisatawan dari Negara Amerika serikat dengan jumlah 55 orang.
 - b. Penerimaan retribusi obyek wisata Kabupaten Kaimana diatur pada Peraturan Bupati Kaimana pada tahun 2009. Setiap wisatawan yang masuk ke wilayah Kabupaten Kaimana diwajibkan membayar biaya retribusi sesuai dengan ayat 2 yang menyatakan bahwa tarif retribusi untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 500.000,-/ Orang / tahun dan untuk wisatawan domestik sebesar Rp 250.000,-/ Orang / tahun.

- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaimana diperoleh dari berbagai pendapatan dan dana yang tertulis pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana pada tahun 2012 dan 2013 serta dari penjualan PIN TAG bagi wisatawan yang berkunjung. Pada tahun 2011 hasil penjualan PIN TAG sebanyak Rp 60.000.000,- dan pada tahun 2012 hasil penjualan PIN TAG sebanyak Rp 72.000.000,- .
 - d. Anggaran pembangunan Kabupaten Kaimana pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp 1,245,455,780,906 dari jumlah awal pada tahun 2012 sebesar Rp 1,206,656,764,480 yang dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana pada tahun 2012 dan 2013.
2. Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa:
 - a. Intensitas wisatawan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi obyek wisata hanya karena pada laporan realisasi penerimaan daerah periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, tidak disertakan jumlah retribusi obyek wisata yang didapat (tidak ada angka). Hal tersebut diduga adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum pihak-pihak terkait yang menggunakan dana retribusi tersebut untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini dipicu lemahnya pengawasan Bupati.
 - b. Intensitas wisatawan yang berkunjung berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaimana. Intensitas wisatawan terhitung tinggi dan membuat pengelola wisata menyediakan hotel, *restaurant*, dan berbagai tempat hiburan bagi para wisatawan yang

berkunjung. Penyedia hotel, *restaurant* dan berbagai tempat hiburan lain menerapkan biaya pajak kepada wisatawan yang berkunjung yang nantinya masuk dalam anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- c. Intensitas wisatawan berpengaruh terhadap anggaran pembangunan daerah. Intensitas wisatawan yang tinggi menuntut adanya pembangunan program wisata yang dirasa masih diperlukan adanya peningkatan. Pembangunan program wisata dilakukan dengan pengembangan dan penambahan pada sarana serta prasarana penunjang di lokasi wisata dengan memanfaatkan anggaran yang didapat dari biaya yang dibebankan pada wisatawan saat melakukan kegiatan wisata di Kabupaten Kaimana.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang telah di simpulkan di atas, maka pada kesempatan ini kami memberikan saran kepada pemerintah daerah agar sama-sama memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Intensitas wisatawan. Hal ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut :

1. Mengingat tidak ada pengaruh intensitas terhadap penerimaan retribusi obyek wisata, sebaiknya dilakukan audit mendalam terkait pemasukan dana, khususnya penerimaan objek wisata karena ada indikasi penyalahgunaan anggaran.

2. Diperlukan pengawasan khusus terkait aliran dana, khususnya pariwisata karena wisata di Kabupaten Kaimana sangat potensial untuk pengembangan wilayah tersebut. Bupati perlu intensif melakukan pengawasan terhadap alur penerimaan anggaran retribusi obyek wisata agar penerimaan retribusi dapat masuk dalam anggaran pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (1984). *Pajak Dan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- APBN. (2013). *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Arlina, R., & Purwanti, E. Y. (2013). Analisis Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata Di Provinsi DKI Jakarta Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Diponegoro Journal of Economics Volume 2 Nomor 3*, 1-15.
- Azis, H. A. (2012, Agustus 13). *Mengurai Strategi Kebijakan Anggaran Pembangunan Nasional*. Dipetik Oktober 1, 2013, dari <http://hharryazharazis.com/detail/302/.cnet>
- Bappeda. Kab. Cirebon (2012). *Kajian Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kuningan*. Cirebon: Lembaga Penelitian UNSWAGATI.
- Davey, K. J. (1998). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI Press.
- Depdagri. (1997). *Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Kepmendagri No.690.900.327.1996.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah , Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Peberbut ANDI.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhlis, I. (2010, April 29). Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Seminar Regional Perpajakan* , hal. 1-6.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbt Andi.
- Pleanggra, F., & Yusuf, E. (2012). Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, jumlah Wisatawan Dan Pendapatan Retribusi Objek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics Volume 1 Nomor 1* , 1-8.

- Pralina, C. Y. (2012). Keterkaitan Pariwisata Terhadap Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Diponegoro Journal of Economics* , 49-57.
- Rahma, F. N., & Handayani, H. R. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus. *Diponegoro Journal of Economics Volume 2 Nomor 2*, 1-9.
- Rustiadi, E. (2001). Paradigma Baru Pembangunan Wilayah Di Era Otonomi Daerah. *Lokakarya Otonomi Daerah 2001* (hal. 1-18). Jakarta: Perak Study Club-Jakarta Media Center.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial Bandung*. Bandung: Refika Aditama.
- Soamole, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Suatu Studi Di Kabupaten Kepulauan Sula). *Governance* , 90-94.
- Soelarno, S. (2000). *Administrasi Pendapatan Daerah*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Suparmoko, M. dan Irawan. (1986). *Ekonomi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Libarty.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- United Nations Development Programme. (2010). *Peningkatan Kinerja Pembangunan: Alat-Alat Praktis Dari Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) untuk jangka waktu 5 tahun.
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang tentang perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Manajemen Pembangunan Indoensia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Wenur, G. P. (2013). Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA Vol. 1 No.3* , 626-633.
- Yosefi, E., & Subarudi. (2007). Kontribusi Taman Nasional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Taman Nasional Bromo Tengger Semeru). *Sosial Ekonomi Volume 7. Nomor 3*, 163-174.
- Elvida Yosefie S Dan Subarudi (2007) Penelitian yang *dilakukan dengan tujuan Mengidentifikasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA)* yang dimiliki Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,
- Tambunan (1996) dalam Sirojuzilam (2010) *memberi tahapan dalam pembangunan ekonomi regional*